

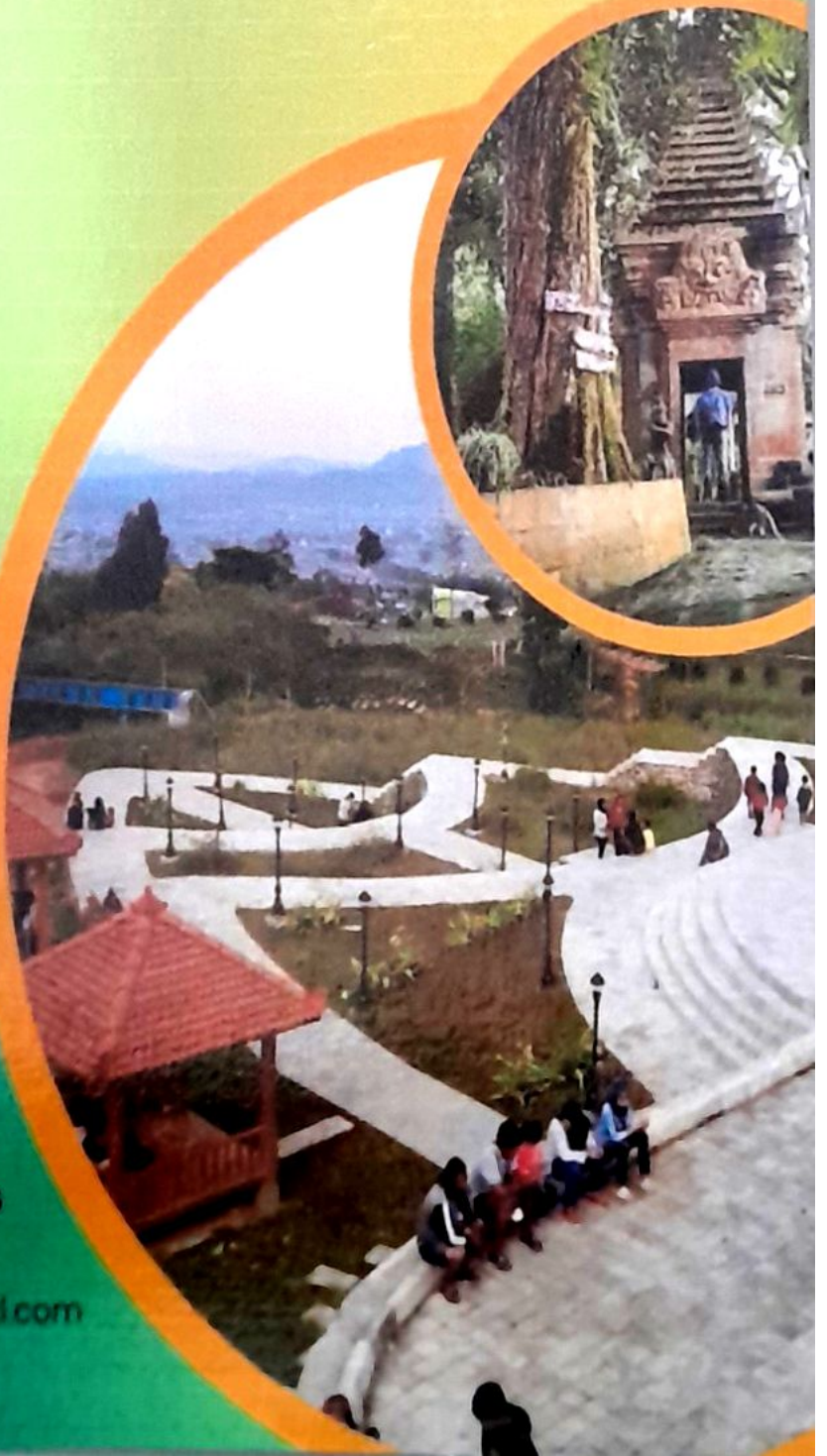
**PERATURAN KEPALA DESA TEGALREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

 permdestegalrejo2309@gmail.com





**PERATURAN KEPALA DESA TEGALREJO
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA TEGALREJO
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN NGADIREJO

PERATURAN KEPALA DESA TEGALREJO

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALREJO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalrejo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) Bagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Temanggung

- Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
 26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50);
 27. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2019);
 28. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2024 Nomor 4)
 29. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2024 Nomor 5);
 30. Peraturan Desa Tegalrejo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalrejo Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEGALREJO TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALREJOI TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	341.432.513,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.611.211.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	5.300.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.957.943.813,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	963.110.763,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.069.762.468,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	28.030.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	8.000.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp 50.400.000,00

Jumlah Belanja	Rp	2.119.303.231,00
----------------	----	------------------

Surplus/(Defisit)	Rp	(161.359.418,00)
-------------------	----	------------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	161.359.418,00
--------------------------	----	----------------

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
---------------------------	----	------

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	161.359.418,00
--------------------------	----	----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
--	----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tegalrejo

pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DESA



WIGATI

Diundangkan di Tegalrejo

pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

SEPTIANA WIJAYANTI

BERITA DESA TEGALREJO TAHUN 2024 NOMOR 4.

Nomor : 4
Tahun : 2024

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEGALREJO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	7
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			341.432.513,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.000.000,00	
4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			2.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			339.432.513,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			333.500.000,00	
4.1.2.91	Bangunan Milik Desa			5.932.513,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.611.211.300,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.147.787.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.147.787.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			30.120.700,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			30.120.700,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			401.803.600,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			401.803.600,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			31.500.000,00	
4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			31.500.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			5.300.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			4.100.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			4.100.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			1.200.000,00	
4.3.9.91	Insentif P8B-P2			1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN		REKAPITULASI			ANGGARAN	SUMBER DANA
	1	2	3	VOLUME	SATUAN		
			JUMLAH PENDAPATAN	4	5	6	7
01	5		BELANJA			1.957.943.813,00	
01.01.			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			963.110.763,00	
			Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			827.420.763,00	
1.01.01.			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB	46.320.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.		Belanja Pegawai			46.320.000,00	
1.01.01.	5.1.1.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			46.320.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01		Penghasilan Tetap Kepala Desa			34.320.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02		Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	335.736.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.		Belanja Pegawai			335.736.000,00	
1.01.02.	5.1.2.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			335.736.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01		Penghasilan Tetap Perangkat Desa			297.756.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02		Tunjangan Perangkat Desa			37.980.000,00	
1.01.04.			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	62.275.944,00	DLL, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.		Belanja Barang dan Jasa			62.275.944,00	
1.01.04.	5.2.1.		Belanja Barang Perlengkapan			8.301.944,00	
1.01.04.	5.2.1.01		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.02		Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.03		Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.315.266,00	
1.01.04.	5.2.1.05		Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			986.678,00	
1.01.04.	5.2.1.06		Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.		Belanja Jasa Honorarium			40.800.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03		Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06		Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			16.800.000,00	
1.01.04.	5.2.3.		Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
1.01.04	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
1.01.04	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.500.000,00	
1.01.04	5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran			5.850.000,00	
1.01.04	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			1.200.000,00	
1.01.04	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			350.000,00	
1.01.04	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			1.200.000,00	
1.01.04	5.2.5.90	Belanja Jasa transaksi keuangan (biaya pajak dan administrasi bank)			1.100.000,00	
1.01.04	5.2.5.91	Belanja Jasa Sertifikat Tanah/PBB			2.000.000,00	
1.01.04	5.2.5.99	Biaya Admin Bank			0,00	
1.01.04	5.2.6	Belanja Pemeliharaan			5.324.000,00	
1.01.04	5.2.6.07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Seluran Sungai/Embung/Air Bersih			3.500.000,00	
1.01.04	5.2.6.90	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor			1.824.000,00	
1.01.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7	OB	24.307.200,00	ADD
1.01.05	5.1	Belanja Pegawai			24.307.200,00	
1.01.05	5.1.4	Tunjangan BPD			24.307.200,00	
1.01.05	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			23.400.000,00	
1.01.05	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			907.200,00	
1.01.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	1	Paket	2.169.319,00	ADD
1.01.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa			2.169.319,00	
1.01.06	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			1.919.319,00	
1.01.06	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			169.319,00	
1.01.06	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.750.000,00	
1.01.06	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			250.000,00	
1.01.06	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			250.000,00	
1.01.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	35	OB	35.700.000,00	PAD, PBK
1.01.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa			35.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.07.	5.2.2.			35.700.000,00	
1.01.07.	5.2.2.94			35.700.000,00	
1.01.08.		3	Paket	34.000.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.			34.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.			10.750.000,00	
1.01.08.	5.2.1.01			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.05			2.000.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06			6.750.000,00	
1.01.08.	5.2.3.			5.750.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01			5.750.000,00	
1.01.08.	5.2.4.			8.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02			8.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.			9.500.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99			9.500.000,00	
1.01.90.		13	OB	285.000.000,00	PAD
1.01.90.	5.1.			285.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.			60.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92			60.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.			225.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.92			225.000.000,00	
1.01.93.		1	Paket	1.912.300,00	PBH
1.01.93.	5.1.			1.912.300,00	
1.01.93.	5.1.3.			1.912.300,00	
1.01.93.	5.1.3.03			186.000,00	
1.01.93.	5.1.3.04			1.726.300,00	
01.02.				50.000.000,00	